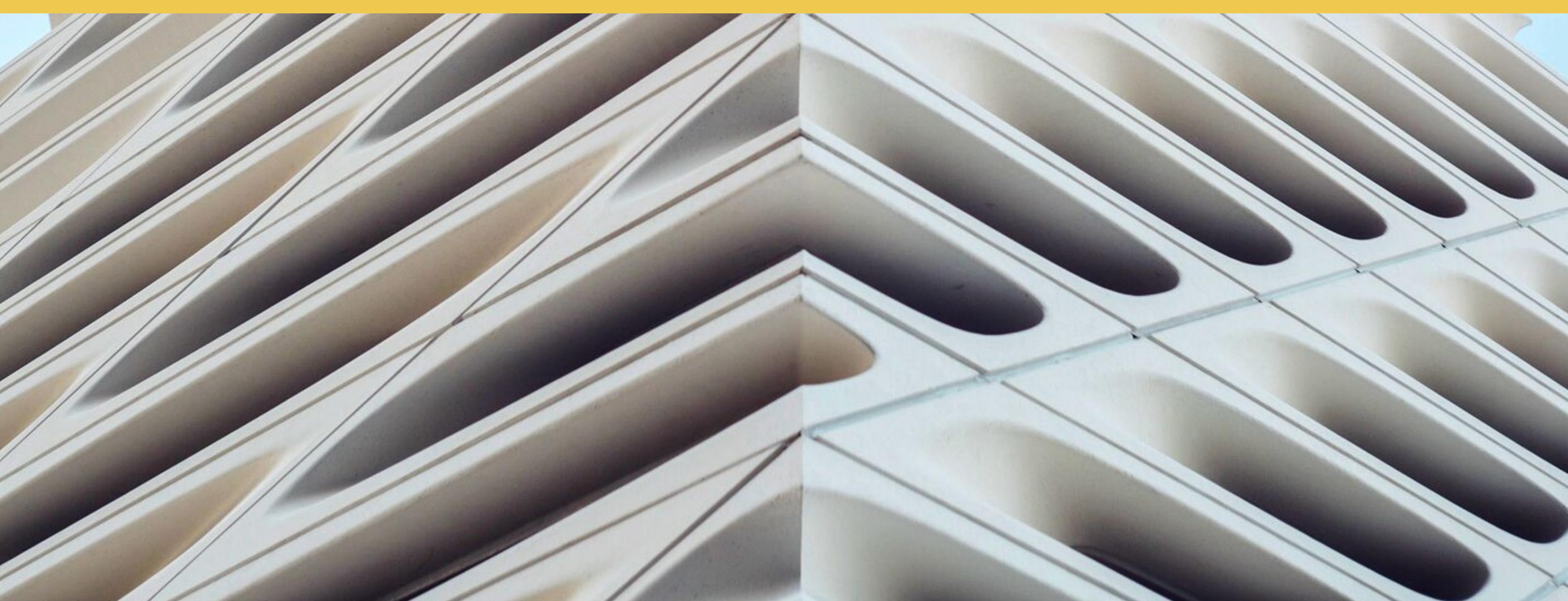


BUKU PANDUAN MODULE SISTEM INFORMASI DISIPLIN (SIADIS)



PROJECT LEADER

DEWI MEIKA SAFITRI, SH
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN
APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM

PROJECT TITLE

PENGELOLAAN DATA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN MELALUI SISTEM
INFORMASI DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL (SIADIS)

0 1

DASAR HUKUM

Dasar Hukum sebagai acuan dalam pembuatan module sistem informasi disiplin:

1. UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
2. PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
3. PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
4. Peraturan Kepala BKN No. 21 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Ketentuan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil

DESKRIPSI

Sistem Informasi Disiplin (Siadis) PNS pada Sub Bidang Pembinaan Aparatur dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan merupakan sistem pengelolaan data penjatuhan hukuman disiplin pegawai berbasis aplikasi yang dimaksudkan untuk memberikan penyajian data secara akurat, cepat dan akuntabel mengenai data penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan adanya aplikasi tersebut diharapkan dapat mengetahui tingkat kedisiplinan dan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan serta sebagai preseden bagi pimpinan dalam penjatuhan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil. Aplikasi ini menjadi salah satu fitur pada aplikasi SILKA di BKPPD Kabupaten Balangan.

LATAR BELAKANG (BURNING PLATFORM)

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yaitu melaksanakan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan aparatur daerah. Pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian diantaranya dalam hal pembinaan aparatur dan kedudukan hukum pegawai. Dengan adanya upaya peningkatan pembinaan aparatur diharapkan pelanggaran disiplin dapat diminimalisir dan penanganan kasus-kasus dapat ditangani dengan cepat.

Dengan adanya upaya peningkatan pembinaan aparatur diharapkan pelanggaran disiplin dapat diminimalisir dan penanganan kasus-kasus disiplin dapat ditangani dengan cepat. Mengingat masih adanya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan diantaranya pelanggaran terhadap ketentuan jam kerja, penyalahgunaan obat-obatan dan narkotika, penyalahgunaan wewenang terhadap jabatan, melakukan perkawinan tanpa izin atasan dan isteri pertama serta pelanggaran disiplin lainnya, terhadap pelanggaran tersebut pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman kepada Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin.

Penjatuhan hukuman disiplin bersifat pembinaan yaitu untuk memperbaik dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi serta memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Juga dimaksudkan agar Pegawai Negeri Sipil lainnya tidak melakukan pelanggaran disiplin.

Dalam rangka tertib administrasi sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 47 menyebutkan pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil di lingkungannya. Dokumen keputusan penjatuhan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

0 2

Pada saat ini pendokumentasian data penjatuhan hukuman disiplin dilakukan secara manual yaitu menyimpan fisik arsip berupa kertas. Hal ini menjadi kendala karena berakibat tidak terkelolanya arsip data penjatuhan hukuman disiplin dengan baik dan sulitnya mendapatkan kembali pada saat diperlukan (SKPD yang tidak menyampaikan data penjatuhan hukuman disiplin kepada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah). Selain itu, dalam hal pelanggaran disiplin berupa ketentuan jam kerja khususnya yang masih dalam kewenangan SKPD Pelanggaran Disiplin Tingkat Ringan) masih ada SKPD yang tidak melaksanakan pendokumentasian / penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Terkait pengolahan data dan penyajian informasi kepegawaian, saat ini Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan menggunakan aplikasi komputer yaitu SILKA Online (Sistem Informasi dan Layanan Kepegawaian Online). Namun dalam layanan aplikasi tersebut tidak terdapat menu data disiplin pegawai.

Berkaitan dengan hal tersebut, ditemukan beberapa area kegiatan yang bermasalah menurut isu permasalahannya, yaitu :

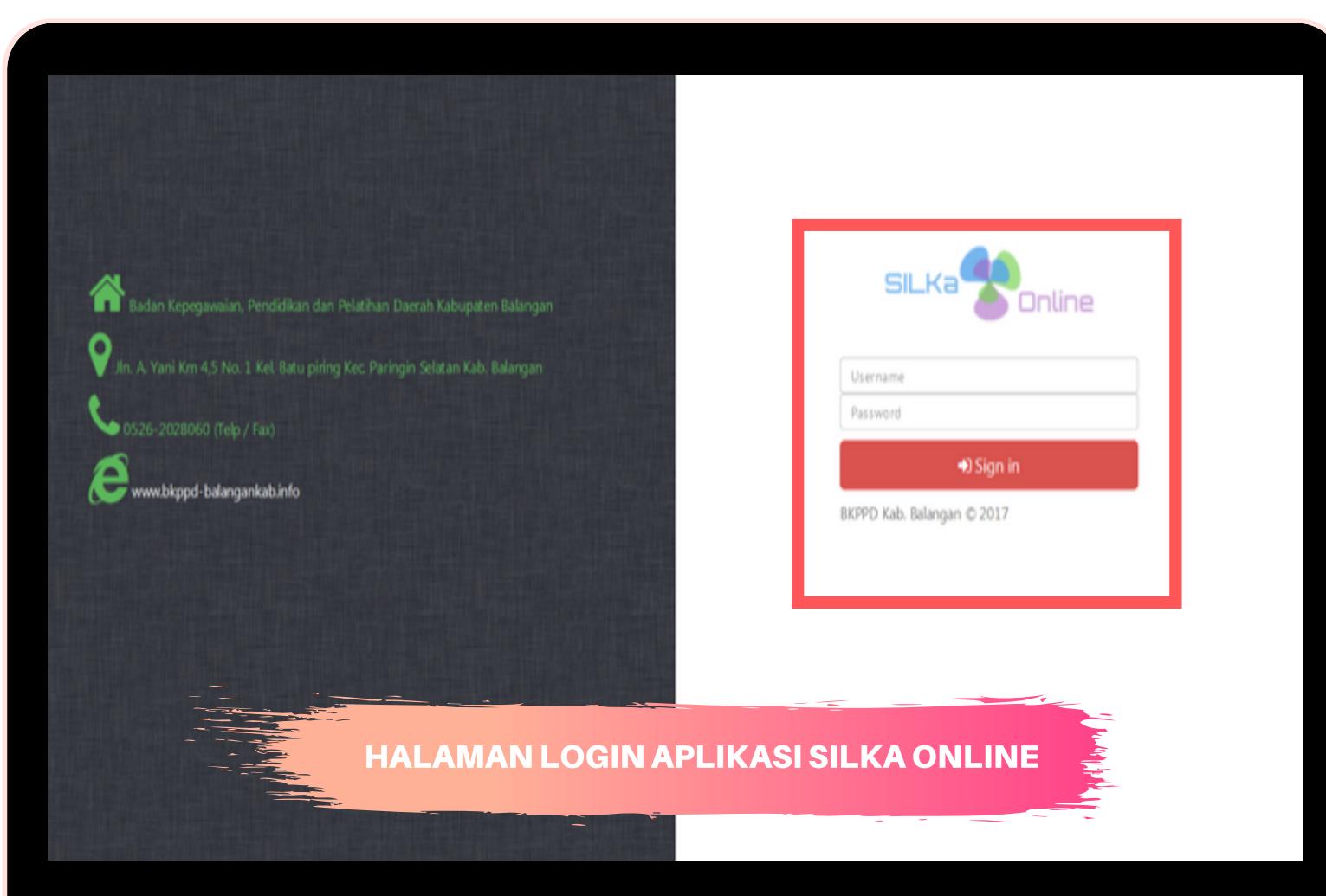
- a. Belum optimalnya pengelolaan data Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Balangan.
- b. Kurangnya pemahaman Pejabat Struktural dan Fungsional dalam penjatuhan hukuman disiplin.
- c. Belum optimalnya rekapitulasi absensi kehadiran Pegawai Negeri Sipil.
- d. Belum ada regulasi Peraturan Kepala Daerah tentang Kode Etik Pegawai.
- e. Belum optimalnya kegiatan pembekalan bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan purna tugas.

Berdasarkan permasalahan diatas, sehingga diperlukan proyek perubahan untuk mengoptimalkan Pengelolaan Data Disiplin Pegawai dengan melaksanakan Pengelolaan Penjatuhan Hukuman Disiplin Melalui Sistem Informasi Disiplin (Siadis) Pegawai Negeri Sipil Pada Sub Bidang Pembinaan Aparatur Dan Kedudukan Hukum Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Balangan.

SISTEM INFORMASI
DISIPLIN
03

HTTP://SILKA.BKPPD-BALANGANKAB.INFO

PETUNJUK PENGGUNAAN APLIAKSI



Pertama masukan url alamat Aplikasi silka Online (<http://silka.bkppd-balangankab.info>), maka akan di arahkan pada halaman login. Kemudian Masukan Username dan Password yang telah terdaftar pada aplikasi, khususnya bagi PNS yang menduduki jabatan sebagai Pengelola Kepegawaian pada SKPD atau Unit Kerja.



Setelah login berhasil, user akan di alihkan ke halaman utama aplikasi SILKA

SISTEM INFORMASI DISIPLIN

04

HTTP://SILKA.BKPPD-BALANGANKAB.INFO

Submenu Tambahan Komponen Siadis

1. Laporkan Hukdis
2. Validasi
3. Statistik

HALAMAN PROFIL PEGAWAI DAN MENU SIDADIS

Menu SIADIS

Setelah user berhasil masuk pada aplikasi SILKA, user dapat mengecek beberapa riwayat dan kelengkapan data pegawai yang bersangkutan terkena hukuman disiplin, apabila terdapat bahan yang diperlukan. Selanjutnya terdapat Menu baru (New) Proyek Perubahan **SIADIS** dengan beberapa *Submenu* Tambahan sebagai komponen dari Module Siadis.

Catatan:

Submenu *Validasi* dan *Statistik* hanya dapat dilihat oleh Admin BKPPD

LAPOR HUKUMAN DISIPLIN

TAMBAH USUL HUKUMAN DISIPLIN

MASUK PADA MENU LAPORKAN SIADIS

Tombol tambah formulir hukuman disiplin

Masukan nip yang bersangkutan, lalu pilih jenis hukuman disiplin yang diberikan.
Dalam contoh ini, kita menggunakan nip (198705242010012015) A.n DEWI MEIKA SAFITRI, SH. Dengan Teguran Lisan (Ringan)

Masuk pada Submenu **Laporkan Hukdis**, user dapat mengisi form yang telah tersedia dan mengikuti langkah - langkah diatas!

TAMBAH USUL HUKUMAN DISIPLIN

◀ Batal

NIP :

Jenis Hukdis :

 DEWI MEIKA SAFITRI, SH
KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM
BANDAR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH

Kasus Ketidakhadiran : Pilih YA, jika kasus yang dilaporkan berkaitan dengan KETIDAKHADIRAN

Panggilan I :
No. Surat :
Tgl. Surat : dd-mm-yyyy
Tgl. Pemeriksaan I : dd-mm-yyyy

Panggilan II :
No. Surat :
Tgl. Surat : dd-mm-yyyy
Tgl. Pemeriksaan II : dd-mm-yyyy

TMT Hukuman : dd-mm-yyyy

Deskripsi Kesalahan :

Peraturan terkait :

Pejabat YBW :

No. SK :

Tgl. SK : dd-mm-yyyy

Simpan

FORM LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN

Setelah Nama / Nip yang bersangkutan ditemukan, pelapor wajib mengisi seluruh formulir yang tersedia, sesuai dengan jenis hukuman yang diberikan

SISTEM INFORMASI DISIPLIN

06

HTTP://SILKA.BKPPD-BALANGANKAB.INFO

VALIDASI USUL HUKUMAN DISIPLIN

Sukses, Laporan Hukuman Disiplin DEWI MEIKA SAFITRI, SH telah disetujui, dan telah ditambahkan ke riwayat Hukuman Disiplin

Pilih Tahun TMT Hukuman Disiplin 2019

Cetak Nominalif Tahun 2019

| # | NIP / Nama | Jabatan / Unit Kerja pada saat Hukdis | Jenis Hukuman Ketentuan yang dilanggar | TMT Hukuman Status Laporan | Aksi |
|---|---|--|---|----------------------------|----------|
| 1 | NIP. 198705242010012015 DEWI MEIKA SAFITRI, SH | KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | TEGURAN LISAN PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS | 30 April 2019 Setuju | Validasi |

DETAIL HUKUMAN DISIPLIN

| | | |
|---|--|--|
| IDENTITAS PNS Pada saat dijatuhi Hukuman Disiplin | NIP : 198705242010012015 NAMA : DEWI MEIKA SAFITRI, SH Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM PADA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH TMT Jabatan : 29 Desember 2016 Pangkat (Golru) : PENATA (III/C) TMT Pangkat (Golru) : 01 April 2016 Gaji : Rp. 3.021.300 TMT Gaji : 01 April 2016 | |
| DETAIL Hukuman Disiplin | Jenis Hukuman : TEGURAN LISAN TINGKAT: RINGAN Panggilan Pertama : No. Surat Penggilan. 800/453/bkppd-blg/2019 (Tanggal 05 April 2019) Pemeriksaan Pertama pada tanggal 07 April 2019 Panggilan Kedua : Panggilan Kedua tidak dilakukan Pemeriksaan Kedua tidak dilakukan Peraturan yang dilanggar : PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS Masa Hukuman : Terhitung mulai. 30 April 2019 Lama Hukuman : 0 Tahun, 0 Bulan Deskripsi Kasus : PELANGGARAN KETIDAKHADIRAN Surat Keputusan : Pejabat berwenang. SUFRIANNOR, S.Sos, M.AP (KEPALA) Nomor. 826/512/bkppd-blg Tanggal. 30 April 2019 | |

Status Laporan
SETUJU

Dilaporkan oleh DEWI MEIKA SAFITRI, SH pada tanggal 2019-09-17 09:46:20
Divalidasi oleh FITHRIA CIPTA WULANDARI, A.Md pada tanggal 2019-09-19 07:29:34

VALIDASI BKPPD

Setelah semua data yang dilaporakan telah dikirim, selanjutnya tugas verifikasi pada Badan Kepegawaian agar mengecek apakah data tersebut benar, setelah dinyatakan sesuai maka BKPPD akan memvalidasi laporan tersebut dan automatis sistem akan menyimpan laporan tersebut pada data riwayat hukuman disiplin yang bersangkutan.

SISTEM INFORMASI DISIPLIN

07

HTTP://SILKA.BKPPD-BALANGANKAB.INFO

DEWI MEIKA SAFITRI, SH :: 198705242010012015

| | | | | | |
|----------------------|---|--------------|-----------------|----------------|----|
| Nama Lengkap | DEWI MEIKA SAFITRI | Gelar Depan | | Gelar Belakang | SH |
| Tempat/Tanggal Lahir | BANJARMASIN / 24 Mei 1987 | | | | |
| Alamat | JL. KRISNA X NO. 14 RT. 37 KOMPLEK BUMI PEMURUS PERMAI KEL. PEMURUS DALAM KEC. BANJARMASIN SELATAN BUM TELP. 0852 49 783456 / 0819 51 09124 | | | | |
| Jenis Kelamin | PEREMPUAN | Agama | ISLAM | | |
| Pendidikan | S1-ILMU HUKUM (Lulus tahun 2009 - UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT) | | | | |
| Status Kepegawaian | PNS | Status Kawin | KAWIN | | |
| No. Karpeg | | No. Askes | 0000167379759 | | |
| No. Taspen | | No. NPWP | 159983436731000 | | |
| No. KTP | 6371016405870008 | | | | |
| Pangkat | PENATA (IIIc) --- TMT : 01 April 2016 | | | | |
| Unit Kerja | BANDAR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | | | | |
| Jabatan | KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR DAN KEDUDUKAN HUKUM TMT : 29 Desember 2016 | | | | |



MK dari CPNS : 9 Tahun, 8 Bulan
MK dari PNS : 8 Tahun, 0 Bulan
MK Golru terakhir : 3 Tahun, 5 Bulan
MK Jabatan terakhir : 2 Tahun, 9 Bulan
TMT BUP : 1 Juni 2045
Usia : 32 Tahun, 4 Bulan
Indeks Profesionalitas 2019 :

CPNS PNS Diklat Jabatan Pangkat Pendidikan Keluarga Penghargaan SKP KGB Cuti Hukdis

Untuk melihat riwayat hukuman disiplin, masuk pada halaman profil pegawai terdapat menu ([HUKDIS](#))

RIWAYAT HUKUMAN DISIPLIN
DEWI MEIKA SAFITRI, SH :: 198705242010012015
Penambahan dan Update Riwayat Hukuman Disiplin hanya dapat dilakukan melalui Layanan SIADIS

| # | Jenis Hukuman | TMT Hukuman | Lama Hukuman | Surat Keputusan | Aksi |
|---|---|---------------|--------------------|--|---|
| 1 | TEGURAN LISAN PELANGGAN KETIDAKHADIRAN | 30 April 2019 | 0 Tahun 0 Bulan | KEPALA No. SK. 826/512/bkppd-blg Tgl. SK. 30 April 2019 File SK tidak tersedia, silahkan upload !!! | Hapus Browse... Upload No file selected. |

Contoh di atas terdapat riwayat hukuman disiplin A.n DEWI MEIKA SAFITRI, SH yang terdapat pada halaman profile pegawai. Selanjutnya User melakukan upload file SK Disiplin dengan ukuran file maksimal **1mb** format **PDF**. Apabila file akan dirubah, tinggal upload ulang file yang baru, sistem akan otomatis mereplace file sebelumnya

SISTEM INFORMASI DISIPLIN

08

HTTP://SILKA.BKPPD-BALANGANKAB.INFO

VALIDASI USUL HUKUMAN DISIPLIN

Kembali

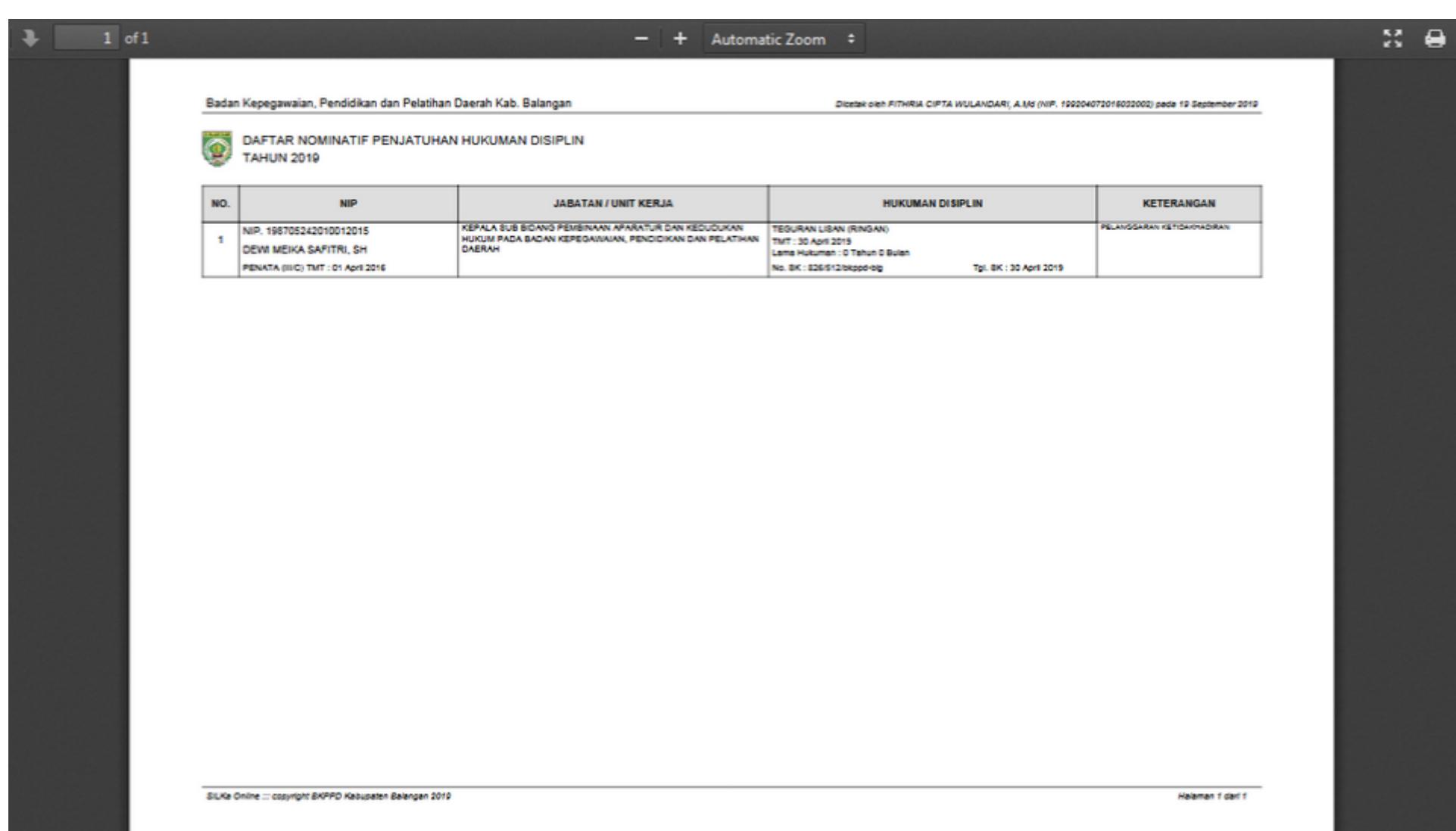
Sukses, Laporan Hukuman Disiplin DEWI MEIKA SAFITRI, SH telah disetujui, dan telah ditambahkan ke riwayat Hukuman Disiplin

Pilih Tahun TMT Hukuman Disiplin 2019

Cetak Nominatif Tahun 2019

| # | NIP / Nama | Jabatan / Unit Kerja pada saat Hukdis | Jenis Hukuman Ketentuan yang dilanggar | TMT Hukuman Status Laporan | Aksi |
|---|---|--|---|----------------------------|------|
| 1 | NIP. 198705242010012015 DEWI MEIKA SAFITRI, SH | KEPALA SUB BIDANG PEMBINAAN APARATUR DAN KEDEDUKN HUKUM PADA BADAN KEPERGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH | TEGURAN LISAN PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS | 30 April 2019 Setuju | |

Kembali ke halaman laporan hukuman disiplin, terdapat tombol **Cetak Nominatif Tahun**. Sekarang hanya Admin BKPPD dapat mencetak nominatif yang terkena hukuman disiplin pada tahun tersebut.



Gambar diatas contoh dari Nominatif Hukuman Disiplin, hanya dapat dilihat oleh Admin BKPPD

SISTEM INFORMASI DISIPLIN

09

HTTP://SILKA.BKPPD-BALANGANKAB.INFO

LAPOR HUKUMAN DISIPLIN

Tambah Hukdis

| # | NIP / Nama | Jenis Hukuman <u>Ketentuan yang dilanggar</u> | TMT Hukuman <u>Status Laporan</u> | Aksi |
|---|---|--|--------------------------------------|---|
| 1 | NIP. 198705242010012015 DEWI MEIKA SAFITRI, SH | TEGURAN LISAN PP 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PNS | 30 April 2019 Setuju | Detail Cetak SK |

PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
BANDAR KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
Jln. A. Yani Km.4,5 Kel. Batu Ping Kec. Pamph. Bantul Telp. (026) 202060
Kab. Bantul

RAHASIA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
NOMOR. 225/S12/2019-010

DENGAN RAMAH TUAHNYA YANG MAWA ESA

Membaca : 1. Berita Acara Penyelesaian tanggal 07 April 2019

Menulis : 2. Bahwa melanggar hasil pemeriksaan tersebut, Bpk. DEWI MEIKA SAFITRI, SH telah beraksara perubahan berupa Tidak Masuk Kerja dan meninggalkan tugas serta mengabaikan tugas yang ditugaskan.

Menghitung : 3. Bahwa penyelesaian tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintah Bapak.

Menghitung : 4. Bahwa pelanggaran diatas berlaku mengacu pada ketentuan hukuman disiplin yang ditetapkan dengan peraturan daerah yang diterbitkan.

Basisi berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimuat dalam huruf a dan huruf b menurut Keputusan tertinggi Peraturan Hukuman Disiplin Teguran Lisan,

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Bapak;

3. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintah Bapak.

MENGETAHUI

KEDUA : Mengeluarkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama : DEWI MEIKA SAFITRI, SH
NIP : 198705242010012015
Pangkat : PENATA (III/C)
Jabatan : KEPALA SUB BIDANG PEMBIANAN APARATUR DAN KEDUDUKN HUKUM

Ketentuan yang bersangkutan telah melanggar ketentuan yang melanggar ketentuan Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Organisasi Pemerintah Bapak.

KEDUA : Kepatuhan ini musti berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Kepatuhan ini dianggap tidak berlaku yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamph
Pada Tanggal : 30 April 2019
KEPALA

SUFRIANNO, S.Sos, MAP
NIP. 1962121963021009

Tandatangan :

- Eko Setiawan (Ketua Dinas)
- Sekretaris Dinas
- Anggota Dinas
- Kepala Bantuan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Bantul

User atau Pengelola Kepegawaian dapat langsung mencetak SK Hukuman Disiplin (**CETAK SK**) jika status laporan telah disetujui oleh BKPPD, dan Cetak SK hanya berlaku untuk Jenis Pelanggaran Ringan yang berkaitan dengan kasus (**KETIDAKHADIRAN**)



Thank you!

Hopefully this manual is useful for users and
brings blessings.